

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- A.Mulya Sumaperwata. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung. Pasundan Law Faculty. 2007
- A.Wahab Daud. *Praktek Hukum Pidana Dan Koneksitas*. Jakarta. Pusbakum. 2001.
- BIT Tamba. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*. Palembang. Universitas Sriwijaya. 1996.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Reflika Aditama. 2011.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika. 2002.
- Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Mandar Maju. 2007.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- Marwan Effendy. *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*. Jakarta. Timpani Publishing. 2010.
- Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 1996.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1983.
- Muhammad Ainul Syamsu. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1981.
- _____. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta. Alumni Ahaem – Petehaem. 1985.

S. Schaffineiser. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Liberty. 1995.

Tabunan. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2005.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Ppengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. LN RI Tahun 1981 No. 76. TLN RI No. 3209.

_____. *Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

_____. *Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN. No. 157 Tahun 2009. TLN. No. 5076.

Website

Ryan Ajie. Warga Sipil. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil/. diakses pada hari Selasa Tanggal 3 Juni 2014 Pukul 21.10.